

Respon Kebijakan Moneter terhadap Inflasi Indonesia Periode Jokowi 2019-2024

¹Syarifatul Ummah; ²Sudirman; ³Sri Dewi Yusuf; ⁴Andi Mardiana 

¹⁻⁴ Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

* Corresponding author: syarifatulummah527@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Kebijakan Moneter,
Inflasi, Indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap inflasi di Indonesia selama periode pemerintahan Jokowi dari tahun 2019 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan moneter dan statistik inflasi dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan, termasuk penetapan suku bunga, pengendalian inflasi, dan stabilitas nilai tukar, berperan penting dalam menjaga inflasi dalam batas target yang ditetapkan. Selama periode tersebut, Bank Indonesia berhasil menyesuaikan suku bunga untuk merespons perubahan kondisi ekonomi, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik global. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan eksternal, seperti lonjakan harga energi dan pangan, kebijakan makroprudensial dan digitalisasi keuangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia telah membantu menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai tujuan inflasi yang diinginkan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan yang diterapkan serta adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

PENDAHULUAN

Interaksi ekonomi antarnegara merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara yang semakin terbuka, di mana keterkaitan antara perekonomian global dan domestik semakin tidak terelakkan. Dalam konteks ini, kejadian ekonomi yang terjadi secara global, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Misalnya, fluktuasi harga minyak dunia yang meningkat dapat memicu inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat, sementara siklus pengetatan moneter global dapat mengakibatkan arus modal yang tidak stabil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah

dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Ketika kondisi ekonomi global tidak menguntungkan, tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari para pembuat kebijakan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk menerapkan kebijakan moneter yang efektif dan efisien, yang tidak hanya mampu merespons dinamika global tetapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan tersebut harus dirancang untuk mengatasi dampak negatif dari kondisi eksternal yang tidak menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk mendorong investasi dan konsumsi domestik. Dengan demikian, interaksi ekonomi internasional, pengaruh peristiwa global, tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, dan perlunya kebijakan moneter yang tepat saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang kompleks dalam pengelolaan perekonomian Indonesia.¹

Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki otoritas kewenangan dalam menentukan kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan dari kebijakan moneter menurut Warjiyo adalah menjaga stabilitas harga (rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi) dan mencukupi luasnya lapangan kerja yang tersedia. Namun, fokus penerapan kerangka kebijakan moneter pada negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia adalah pengendalian laju inflasi.²

Secara umum, Bank Indonesia menargetkan inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Target inflasi ini dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi dan proyeksi inflasi yang ada. Seperti pada tabel 1. Target inflasi Indonesia periode 2019 s.d 2024.

Tabel 1. Target Inflasi

| Tahun | Target Inflasi |
|--------------|-----------------------|
| 2019 | 3,5±1% |
| 2020 | 3,0±1% |
| 2021 | 3,0±1% |
| 2022 | 3,0±1% |
| 2023 | 3,0±1% |
| 2024 | 2,5±1% |

Sumber: diolah dari Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa Bank Indonesia mempunyai target yang sama dari tahun 2020 s.d 2023, yaitu inflasi yang dianggap baik dan sesuai dengan target oleh Bank Indonesia adalah antara 2,0% (3,0% - 1%) dan 4,0% (3,0% + 1%) hanya tahun 2019 dan 2024 yang berbeda yaitu 2,5% s.d 4,5% dan 1,5% s.d 3,5%.³

¹ Amril Arief, "Peranan Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *JESP* 3 (2002): 27-35.

² Perry Warjiyo and Solikin, *Kebijakan Moneter Indonesia, Jurnal Manajemen Maranatha*, vol. 3, 2003.

³ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2019," vol. 16, 2020.

Tingkat inflasi berdasarkan pada kenaikan harga yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang lebih cepat dibandingkan dengan produksi barang dan jasa. Hal ini menjadi fokus utama dalam mencapai stabilitas ekonomi. Stabilitas diperlukan untuk menjaga tingkat inflasi yang dapat diprediksi. Pengendalian inflasi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memastikan kestabilan harga atau biaya.⁴

Di Indonesia, periode kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai pada Oktober tahun 2019 adalah periode yang unik karena mencakup berbagai peristiwa ekonomi global dan domestik yang signifikan, termasuk munculnya pertama kali pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian global dan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis respon kebijakan moneter yang diterapkan selama periode ini terhadap inflasi dan periode tahun berikutnya, guna memahami efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Penelitian yang saat ini dilakukan berfokus bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan selama periode kedua kepemimpinan Jokowi mempengaruhi tingkat inflasi di tahun berikutnya di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa saja kebijakan moneter yang diterapkan selama periode kedua kepemimpinan Jokowi, dan bagaimana dampaknya terhadap inflasi di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, proses pengambilan keputusan, dan interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi inflasi.

Batasan penelitian ini mencakup analisis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah selama periode kedua kepemimpinan Jokowi, yaitu dari Oktober tahun 2019 hingga Oktober 2024. Penelitian ini akan fokus pada data inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Teori Inflasi*

Landasan teori dalam pendukung penelitian ini adalah teori inflasi. Ada 2 teori mengenai inflasi dalam penelitian ini, yaitu teori utamanya adalah *Inflation Targeting* dan teori pendukungnya adalah Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*):

a. *Inflation Targeting*

Inflation targeting (Target Inflasi) bukan hanya sekedar teori ekonomi, namun juga sebagai kerangka kebijakan moneter yang secara nyata diadopsi oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dengan menetapkan target inflasi

⁴ Rini J T Astuti and Daryono Soebagiyo, "ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP DAMPAK INFLASI DI INDONESIA (STUDI KASUS TAHUN 2002-2022).Pdf," *Balitbangda.Lampungprov.Go.Id*, 2024.

tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan moneter. Dengan adanya target inflasi, masyarakat dapat lebih memahami arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh bank sentral, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia. Penerapan target inflasi mencerminkan pergeseran peran bank sentral dari pengelolaan ekonomi yang lebih aktif menjadi lebih fokus pada pencapaian stabilitas harga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

b. Teori Kuantitas Uang

Teori Kuantitas Uang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan tingkat inflasi. Menurut teori ini, inflasi hanya dapat terjadi jika ada peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi dengan peningkatan yang signifikan dalam produksi barang dan jasa. Laju inflasi juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan. Jika masyarakat tidak mengharapkan kenaikan harga, penambahan jumlah uang beredar dapat diterima untuk meningkatkan likuiditas. Namun, jika masyarakat mulai menyadari adanya inflasi, atau dalam kondisi hiperinflasi, kepercayaan terhadap mata uang dapat menurun, yang menyebabkan ekspektasi inflasi semakin meningkat.⁶

c. Teori Ekspektasi Rasional

Teori ekspektasi rasional adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dan pembelajaran dari tren masa lalu. Teori ini merupakan bagian dari kontra-revolusi para pemikir ekonomi aliran Keynes dan Neo-Keynes. Ekspektasi rasional menekankan bahwa masyarakat cenderung berpikir dengan cara yang logis. Ini berarti bahwa proses harapan dan antisipasi mereka didasarkan pada perhitungan yang rasional. Mereka tidak hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, tetapi juga berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana struktur ekonomi berfungsi, interaksi antara berbagai variabel makroekonomi, dan aspek lainnya.⁷

Ketiga teori ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami dan merumuskan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi.

2. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian mengenai Dampak Kebijakan Moneter terhadap Inflasi Indonesia Periode Jokowi (2019 s.d 2024), terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengeksplorasi kebijakan moneter terhadap inflasi Indonesia. Rasyidin,

⁵ Santosa Budi Agus, "Analisis Inflasi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017*, 2017, 445–52.

⁶ Santosa Budi Agus.

⁷ D Mohamad Ahlis and T Andi Darmawati, "Ekspektasi Rasional Dalam Teori Ekonomi Makro," 2022, <https://repository.untad.ac.id/16086/>.

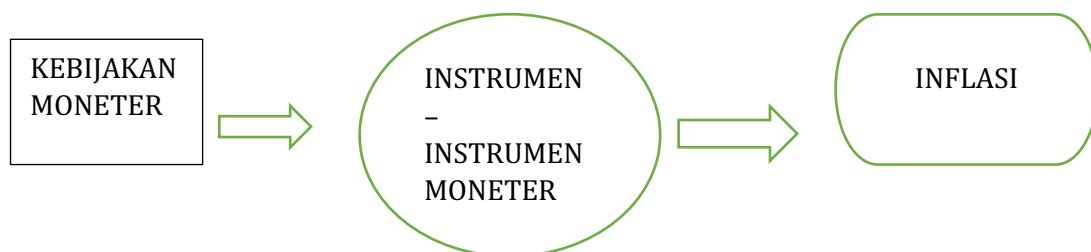
Saleh dkk dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Inflasi di Indonesia dengan metodologi penelitian kuantitatif data sekunder dari tahun 1990 – 2020. Penelitian ini melihat dari unsur suku bunga, jumlah uang yang beredar dan nilai tukar rupiah. Penelitian ini memberikan hasil yang sesuai dengan teori kebijakan moneter bahwa pengaruh kebijakan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) terhadap inflasi cenderung menurunkan inflasi karena berkurangnya kegiatan ekonomi dan permintaan barang dan jasa. Pengaruh jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dalam inflasi karena peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat serta kebijakan nilai tukar rupiah cenderung meningkatkan inflasi karena melemahnya rupiah terhadap dolar AS.⁸

Selain itu ada penelitian yang ditulis oleh Rini dan Daryono yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Dampak Inflasi di Indonesia (Studi Kasus 2002 – 2022). Penelitian ini menggunakan metodo analisis estimasi melewati regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Namun, Ketika dianalisis secara simultan unsur suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar uang memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi sebesar 62,5%.⁹

Dua penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini melalui pendekatan kuantitatif deskriptif analitik.

3. Kerangka Penelitian

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Penjelasan dari kerangka penelitian pada gambar diatas adalah, penelitian ini akan dimulai dengan melihat kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang selanjutnya akan dilakukan analisis dari instrument – instrument moneter yang dilakukan Bank Indonesia yang kemudian menghasilkan inflasi yang sesuai target ataupun tidak.

METODELOGI

1. Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk dokumen kebijakan moneter Bank Indonesia, dan juga data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS).

⁸ M. Rasyidin et al., "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia," *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 2022, <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>.

⁹ J T Astuti and Soebagiyo, "ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP DAMPAK INFLASI DI INDONESIA (STUDI KASUS TAHUN 2002-2022).Pdf."

2. **Pengembangan Model:** Kerangka teoritis inti adalah *Inflation Targeting* , karena Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja ini. Berdasarkan teori tersebut, Bank Indonesia dapat secara efektif mengelola inflasi dengan secara terbuka mengumumkan target inflasi dan menggunakan instrument kebijakan moneter untuk mencapainya. Keberhasilan IT terlihat pada : Kredibilitas dan transparansi, efektivitas intrumen kebijakan moneter dan model yang kuat untuk meramalkan inflasi dan menilai dampak kebijakan.
3. **Method:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dampak kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia.
4. **Steps of Research:**
 - a. Pengumpulan Data: Melakukan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.
 - b. Analisis Data: Menganalisis data menggunakan teknik analisis tematik dan deskriptif kualitatif.
 - c. Interpretasi dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Kebijakan Moneter dari 2019 sampai dengan 2024 dan juga data inflasi dalam waktu kurun yang sama yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Temuan Utama

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia selama periode 2019 s.d 2024 adalah penetapan suku bunga, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, kebijakan makroprudensial, digitalisasi dan inovasi keuangan dan koordinasi dengan pemerintah.

1. Penetapan Suku Bunga

Tahun 2019, BI menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 5,00% pada Oktober 2019 dan kemudian menjadi 4,75% pada Februari 2020. Penurunan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Tahun 2020, suku bunga acuan (BI7DRR) lebih diturunkan dari sebelumnya untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 3,75%. Penurunan suku bunga dilakukan untuk merangsang investasi dan konsumsi.¹¹ Pada tahun 2021, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga yang rendah untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) tetap menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan BI untuk mencapai tujuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. BI terus menjaga suku bunga rendah untuk mempertahankan likuiditas yang cukup dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada pemulihan ekonomi domestik yang terdampak oleh COVID-19. BI juga mempertimbangkan

¹⁰ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2019."

¹¹ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2020," 2021.

stabilitas makroekonomi dan prospek inflasi dalam mempertahankan kebijakan suku bunga rendah.¹² Menginjak tahun 2022, BI mulai menaikkan suku bunga untuk merespon lonjakan inflasi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik (terutama perang Rusia-Ukraina) dan kenaikan harga energi serta pangan, yang menggerakkan inflasi di dalam negeri. Suku bunga acuan ditingkatkan sebesar 175 bps, dari 3,5% menjadi 5,25% pada Desember 2022.¹³ Tahun 2023, BI menaikkan suku bunga kebijakan menjadi 6,0% untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya tarik aset keuangan domestic. Selain itu, instrumen seperti Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diperkenalkan untuk memperkuat pasar uang, meningkatkan aliran modal masuk, dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.¹⁴ Dan pada periode akhir Jokowi, tahun 2024, BI menjaga BI-7DRR di tingkat 5,75% sejak awal tahun untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali. Selain itu, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar level ini, mendukung transmisi kebijakan moneter yang efektif. Imbal hasil Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga diatur pada level kompetitif untuk mendukung aliran masuk modal asing.¹⁵

2. Pengendalian Inflasi

BI menetapkan target inflasi untuk pengendalian inflasi, 2019 3,5±1%, 2020 3,0±1%, 2021 3,0±1%, 2022 3,0±1%, 2023 3,0±1% dan 2024 3,0±1%. Target Inflasi ini berdasarkan rapat dewan Gubernur BI setiap tahunnya. Dalam pengendalian agar inflasi sesuai dengan target, maka respon kebijakan moneter BI adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2019, strategi Pengendalian Inflasi yaitu BI mengedepankan pendekatan *monetary and fiscal policy mix* serta kerja sama melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Fokus pada menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Langkah ini membantu menekan inflasi harga bahan pangan yang bergejolak (*volatile foods*).¹⁶
- b. Tahun 2020, BI melaksanakan Operasi pasar terbuka (OPT) dimana BI mengintervensi pasar uang untuk memastikan likuiditas yang cukup dalam sistem keuangan dan mengendalikan tekanan inflasi.¹⁷
- c. Tahun 2021 Inflasi pada tahun 2020 terjaga pada 1,68%, jauh di bawah target, sebagian besar karena penurunan permintaan yang signifikan akibat pandemi. BI menggunakan berbagai instrumen untuk mengendalikan inflasi, seperti intervensi di pasar uang untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan memastikan likuiditas yang cukup¹⁸

¹² Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2021," 2022.

¹³ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2022," 2023.

¹⁴ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2023," 2024.

¹⁵ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2024," 2024.

¹⁶ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2019."

¹⁷ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2020."

¹⁸ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2021."

- d. Tahun 2022 tercatat naik menjadi 5,5% (year-on-year) pada akhir tahun, jauh lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan sebesar $3\% \pm 1\%$. Salah satu faktor utama yang mendorong inflasi adalah harga energi yang melonjak, serta dampak dari kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar dan listrik serta inflasi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik (terutama perang Rusia-Ukraina. BI mengambil langkah strategis dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang berlebihan dan memastikan bahwa inflasi tetap terkendali dalam jangka panjang.¹⁹
- e. Tahun 2023, Inflasi pada 2023 terkendali dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$, dengan inflasi inti sebesar 2,18% (Agustus 2023). Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antara BI dan pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang fokus pada stabilitas harga pangan di berbagai daerah.²⁰
- f. Tahun 2024, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2024 tetap rendah, tercatat 2,12% (yoy) pada Agustus. Penurunan ini didukung oleh rendahnya inflasi inti dan volatile food (VF), berkat peningkatan pasokan pangan dari musim panen dan sinergi pengendalian inflasi antara TPIP/TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).²¹

3. Stabilitas Nilai Tukar

Kebijakan terhadap nilai tukar dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa Bank Indonesia (BI) secara konsisten menerapkan kebijakan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari tahun 2019, BI melakukan intervensi untuk mengatasi volatilitas nilai tukar yang disebabkan oleh tekanan eksternal, dengan hasil positif berupa penguatan rupiah sekitar 3,58% terhadap dolar AS.²² Pada tahun 2020, intervensi dilakukan secara hati-hati untuk menahan depresiasi rupiah yang berlebihan, diiringi dengan pengelolaan cadangan devisa yang cukup untuk mendukung kebutuhan perdagangan internasional.²³

Memasuki tahun 2021, BI terus melakukan intervensi untuk mencegah depresiasi yang dapat mengganggu kestabilan harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah meningkatnya permintaan dolar AS.²⁴ Tahun 2022 menjadi tantangan dengan volatilitas yang tinggi akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga global, namun BI tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi dan pengelolaan cadangan devisa yang memadai.²⁵

Pada tahun 2023, BI memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui intervensi dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, yang membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya.²⁶ Di

¹⁹ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2022."

²⁰ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2023."

²¹ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2024."

²² Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2019."

²³ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2020."

²⁴ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2021."

²⁵ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2023."

²⁶ Indonesia.

tahun 2024, penggunaan instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI menunjukkan langkah proaktif BI dalam memperkuat stabilitas nilai tukar, yang berkontribusi pada peningkatan aliran masuk modal asing dan mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi domestik.²⁷

Secara keseluruhan, kebijakan nilai tukar dari tahun 2019 hingga 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kondisi pasar global, kebijakan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, yang semuanya memerlukan respons yang adaptif dan strategis dari BI untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

4. Kebijakan Makroprudensial

Sepanjang tahun 2019 hingga 2024, respon Kebijakan Moneter Bank Indonesia terhadap inflasi dengan menerapkan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk sektor properti dan kendaraan bermotor, serta penguatan inklusi keuangan melalui dukungan terhadap sektor UMKM. Pada tahun 2023, BI memperkuat stimulus makroprudensial dengan memberikan insentif likuiditas kepada perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor strategis. Di tahun 2024, kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan pengelolaan likuiditas.

Kebijakan makroprudensial yang diambil oleh BI berfokus pada pengendalian inflasi dengan cara mendorong aliran kredit yang tepat sasaran dan menjaga stabilitas harga. Pelonggaran kebijakan LTV dan FTV berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu permintaan dan berpotensi meningkatkan inflasi. Namun, langkah-langkah pengendalian inflasi, seperti pengaturan suku bunga dan pengawasan terhadap kredit bermasalah, diambil untuk memitigasi risiko inflasi yang berlebihan. Data menunjukkan bahwa inflasi tetap terkendali dalam rentang target BI, meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal dan permintaan domestik. Data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi tahunan Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,68%, meningkat menjadi 3,61% pada tahun 2021, dan kembali turun menjadi 2,63% pada tahun 2022.
- b. Pada tahun 2023, inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 3-4%, sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang diterapkan.
- c. Penyaluran kredit UMKM meningkat sebesar 15% pada tahun 2022, menunjukkan dampak positif dari kebijakan BI.

5. Digitalisasi dan Inovasi Keuangan

Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung digitalisasi dan inovasi keuangan, dimulai dengan peluncuran QRIS pada tahun 2019, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Seiring berjalannya waktu, BI terus memperkenalkan regulasi yang mendorong penggunaan uang elektronik dan sistem pembayaran digital, serta mengatur perkembangan fintech untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

²⁷ Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2024."

BI telah mengambil berbagai inisiatif untuk mendorong adopsi teknologi keuangan, termasuk peluncuran Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan pengembangan sistem pembayaran digital yang lebih adaptif. Selain itu, BI juga memperkenalkan fitur-fitur baru dalam QRIS, seperti Tarik Tunai dan Transfer, serta Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk memperluas ekosistem keuangan digital.

6. Koordinasi dengan pemerintah

a. Tahun 2019 Kerjasama Kebijakan Fiskal dan Moneter: Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengendalikan defisit anggaran, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mengelola risiko utang. Selain itu BI melakukan Strategi Keuangan Inklusif dengan mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk memperluas layanan keuangan digital.

b. Tahun 2020 merumuskan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun ini, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan sejalan. Beberapa langkah yang diambil meliputi:

- Kebijakan Fiskal Ekspansif: Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan belanja infrastruktur, yang sejalan dengan kebijakan moneter BI yang lebih longgar.
- Pembangunan Infrastruktur: Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur yang didanai APBN membantu distribusi barang dan mengurangi inflasi.

Koordinasi ini juga mencakup pengendalian inflasi melalui program stabilitas harga dan kebijakan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat.

c. Tahun 2021 Bank Indonesia dan pemerintah tetap menjadi kunci dalam mengelola kebijakan ekonomi. BI terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan moneter dan fiskal saling mendukung, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemerintah meningkatkan belanja APBN dan memberikan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu BI mendukung program stimulus pemerintah yang memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

d. Tahun 2022 BI bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, terutama dalam pengendalian harga pangan dan energi, serta memastikan distribusi barang yang lancar. Pemerintah juga menerapkan subsidi dan pengaturan harga energi untuk meringankan beban masyarakat. Kemudian Pemerintah melanjutkan kebijakan stimulus ekonomi dan program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat yang terdampak lonjakan harga. BI mendukung kebijakan ini dengan menjaga stabilitas moneter.

e. Tahun 2023 BI memperkuat koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kerjasama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan pembiayaan sektor prioritas.

f. Tahun 2024, BI terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP/TPID untuk menjaga stabilitas inflasi. Program GNPIP

menjadi salah satu upaya untuk menurunkan inflasi pangan, sementara stabilitas harga energi didukung oleh kebijakan subsidi pemerintah..

Tren Inflasi

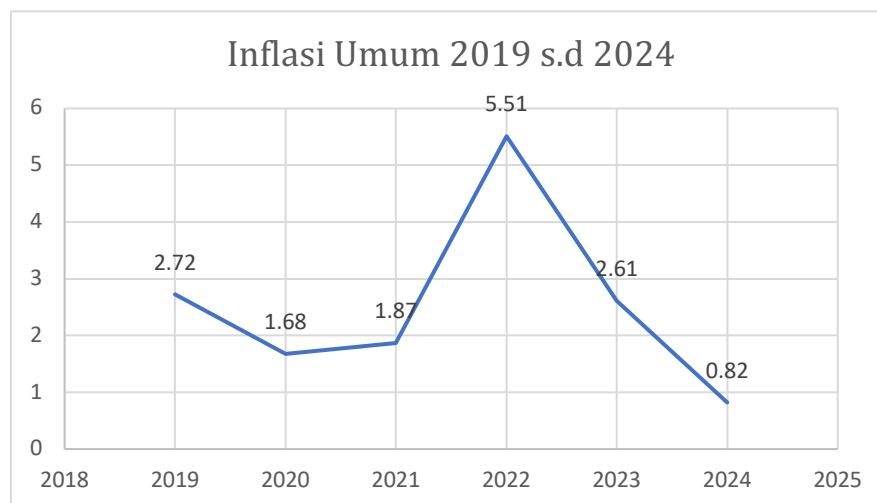
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, yang diolah, target dan inflasi faktual yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Capaian Inflasi Aktual

| Tahun | Target Inflasi | Inflasi Aktual (%,yoy) |
|-------|----------------|---------------------------|
| 2019 | 3,5±1% | 2,72 |
| 2020 | 3±1% | 1,68 |
| 2021 | 3±1% | 1,87 |
| 2022 | 3±1% | 5,51 |
| 2023 | 3±1% | 2,61 |
| 2024 | 2,5±1% | 0,82 |

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia²⁸

Gambar 2. Grafik Inflasi Umum 2019 s.d 2024



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik, 2024

Korelasi Kebijakan Moneter dan Inflasi

Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Secara umum, terdapat pola yang jelas antara kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh BI dan tingkat inflasi yang terjadi pada periode 2019 sampai 2024.

1. **Penetapan Suku Bunga dan Inflasi:** Ketika BI menurunkan suku bunga, seperti yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2020, hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga ini sering

²⁸ Bank Sentral Republik Indonesia, "Data Inflasi," *Www.Bi.Go.Id*, 2022, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.

kali diikuti oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Sebaliknya, ketika BI menaikkan suku bunga, seperti yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan inflasi yang meningkat akibat faktor eksternal dan permintaan domestik yang tinggi.

2. **Target Inflasi:** BI menetapkan target inflasi tahunan yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter. Ketika inflasi berada di atas target, BI cenderung merespons dengan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Sebaliknya, jika inflasi berada di bawah target, BI dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan.,
3. **Pengendalian Inflasi Melalui Kebijakan Makroprudensial:** Selain suku bunga, BI juga menggunakan kebijakan makroprudensial untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berpotensi meningkatkan permintaan dan inflasi. Namun, BI juga mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko inflasi yang berlebihan melalui pengawasan kredit dan pengaturan suku bunga.
4. **Faktor Eksternal:** Inflasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti harga energi dan pangan global, yang dapat memicu inflasi domestik. Kebijakan BI dalam merespons faktor-faktor ini, seperti intervensi di pasar valuta asing dan pengaturan harga, menunjukkan hubungan yang kompleks antara kebijakan moneter dan inflasi.

Secara keseluruhan, terdapat pola yang jelas antara kebijakan moneter BI dan tingkat inflasi, di mana perubahan suku bunga dan kebijakan makroprudensial berfungsi sebagai alat untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

Analisis Dampak Kebijakan

Kebijakan moneter Bank Indonesia dapat dianggap efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam konteks penyesuaian suku bunga yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.²⁹ Dalam periode 2019 sampai dengan 2024, BI berhasil menjaga inflasi dalam kisaran target yang ditetapkan, meskipun terdapat tantangan yang signifikan. Sebagai contoh atas dampak kebijakan tersebut adalah kebijakan makroprudensial. Pada kebijakan ini, BI fokus pada pengendalian inflasi dengan cara mendorong aliran kredit yang tepat sasaran dan menjaga stabilitas harga. Pelonggaran kebijakan LTV dan FTV berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu permintaan dan berpotensi meningkatkan inflasi. Namun, langkah-langkah pengendalian inflasi, seperti pengaturan suku bunga dan pengawasan terhadap kredit bermasalah, diambil untuk memitigasi risiko inflasi yang berlebihan.

Yang berikutnya adalah kebijakan dalam digitalisasi dan inovasi keuangan yang dikeluarkan BI. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Digitalisasi sistem pembayaran telah meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi pasca-

²⁹ Sulis Septiani et al., "Peran Kebijakan Moneter Di Indonesia Dalam Menghadapi Inflasi," *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 3 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.47134/jae.v1i3.204>.

pandemi.³⁰ Data menunjukkan bahwa inflasi tetap terkendali dalam rentang target BI, meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal dan permintaan domestik.

Faktor eksternal yang mempengaruhi inflasi ini misalnya, ketegangan geopolitik (Rusia dan Ukraina) kebijakan suku bunga global, dan lonjakan harga komoditas global, seperti minyak dan pangan, sering kali memberikan tekanan inflasi yang sulit dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter.³¹ Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi dan investasi, sehingga mempersulit BI dalam mencapai target inflasi.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan moneter BI telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengendalikan inflasi, tantangan dari faktor eksternal tetap menjadi penghalang. Kebijakan yang diambil oleh BI, seperti penyesuaian suku bunga dan langkah-langkah makroprudensial, menunjukkan respons yang adaptif terhadap kondisi yang berubah. Namun, keberhasilan jangka panjang dalam mencapai stabilitas harga juga memerlukan koordinasi dengan kebijakan fiskal (yaitu pemerintah) dan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan moneter Bank Indonesia telah berhasil dalam banyak aspek, tantangan dari kondisi global dan faktor eksternal lainnya tetap memerlukan perhatian dan strategi yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia telah berhasil mempertahankan inflasi dalam batas target yang telah ditentukan meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik dan lonjakan harga komoditas global. Kebijakan penetapan suku bunga yang responsif, pengendalian inflasi melalui berbagai instrumen, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah telah berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Selain itu Bank Indonesia juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung digitalisasi dan inovasi keuangan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar BI terus memantau perkembangan inflasi dan dampak dari kebijakan makroprudensial yang diterapkan. Penyesuaian kebijakan harus dilakukan secara responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan domestik. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi empat, antara lain:

1. Peningkatan Koordinasi Kebijakan: Bank Indonesia perlu terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi: Untuk mengurangi

³⁰ Esa Negarawati and Siti Rohana, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 4, no. 3 (2024): 46–60, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.

³¹ Batulicin, "Kepala BPS Pusat Rilis Penyebab Inflasi Sepanjang 2022," *Media Center*, 2023, <https://mc.tanahbumbukab.go.id/kepala-bps-pusat-rilis-penyebab-inflasi-sepanjang-2022/>.

ketergantungan pada faktor eksternal, penting bagi pemerintah dan BI untuk mendorong diversifikasi sektor ekonomi, termasuk pengembangan sektor UMKM dan inovasi teknologi.³²

2. Penguatan Kebijakan Makroprudensial: BI harus terus memantau dan menyesuaikan kebijakan makroprudensial untuk memastikan aliran kredit yang tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga dan menghindari risiko inflasi yang berlebihan.³³
3. Adaptasi terhadap Digitalisasi: Inovasi di sektor fintech, memperkuat inisiatif digitalisasi dan inovasi keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.³⁴
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan yang diterapkan, serta menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan global. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bank Indonesia dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan inflasi yang diinginkan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.³⁵

Tantangan dan Peluang

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, BI juga menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti perlunya edukasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi keuangan, serta tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Selain itu, regulasi yang cepat berubah di sektor fintech juga memerlukan penyesuaian yang berkelanjutan.

Melihat ke depan, kebijakan moneter terkait digitalisasi dan inovasi keuangan diharapkan akan terus berkembang, dengan fokus pada peningkatan efisiensi sistem pembayaran dan perluasan inklusi keuangan. BI berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah transformasi digital yang cepat.

³² Pengurus Pusat Ikatan Sajrana Ekonomi Indonesia, "Kajian Kebijakan Publik: Memperkuat Sinergi Untuk Menjaga Stabilitas Dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Di Era Digital," 2022, 1-23.

³³ Universitas Katolik Parahyangan, "Makroprudensial Jadi Penstabil Moneter Dan Keuangan Capai Ekonomi Berkelanjutan," *Unpar.Ac.Id*, 2021, <https://unpar.ac.id/makroprudensial-jadi-penstabil-moneter-dan-keuangan-dalam-mencapai-ekonomi-berkelanjutan/>.

³⁴ Negarawati and Rohana, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital."

³⁵ Donni Fajar Anugrah, Handri Adiwilaga, and Indra Astrayuda, "Sinergi Untuk Ketahanan Dan Pertumbuhan," vol. II, 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/7_LPI2018_BAB 5.pdf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahli, D Mohamad, and T Andi Darmawati. "Ekspektasi Rasional Dalam Teori Ekonomi Makro," 2022. <https://repository.untad.ac.id/16086/>.
- Arief, Amril. "Peranan Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *JESP* 3 (2002): 27–35.
- Bank Sentral Republik Indonesia. "Data Inflasi." *Www.Bi.Go.Id*, 2022. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.
- Batulicin. "Kepala BPS Pusat Rilis Penyebab Inflasi Sepanjang 2022." *Media Center*, 2023. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/kepala-bps-pusat-rilis-penyebab-inflasi-sepanjang-2022/>.
- Donni Fajar Anugrah, Handri Adiwilaga, and Indra Astrayuda. "Sinergi Untuk Ketahanan Dan Pertumbuhan." Vol. II, 2018. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/7_LPI2018_BAB 5.pdf.
- Indonesia, Bank. "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2024," 2024.
- . "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2019." Vol. 16, 2020.
- . "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2020," 2021.
- . "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2021," 2022.
- . "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2022," 2023.
- . "Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2023," 2024.
- Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Sajrana Ekonomi. "Kajian Kebijakan Publik: Memperkuat Sinergi Untuk Menjaga Stabilitas Dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Di Era Digital," 2022, 1–23.
- J T Astuti, Rini, and Daryono Soebagiyo. "ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP DAMPAK INFLASI DI INDONESIA (STUDI KASUS TAHUN 2002-2022).Pdf." *Balitbangda.Lampungprov.Go.Id*, 2024.
- Negarawati, Esa, and Siti Rohana. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 4, no. 3 (2024): 46–60. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.
- Parahyangan, Universitas Katolik. "Makroprudensial Jadi Penstabil Moneter Dan Keuangan Capai Ekonomi Berkelanjutan." *Unpar.Ac.Id*, 2021. <https://unpar.ac.id/makroprudensial-jadi-penstabil-moneter-dan-keuangan-dalam-mencapai-ekonomi-berkelanjutan/>.
- Rasyidin, M., M. Saleh, Hakim Muttaqim, Nova Nova, and Cut Khairani. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia." *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 2022. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>.
- Santosa Budi Agus. "Analisis Inflasi Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017*, 2017, 445–52.
- Septiani, Sulis, Teti Rahmawati, Vionita Dwi Oktariani, Evi Evi, and Arif Fadilla. "Peran Kebijakan Moneter Di Indonesia Dalam Menghadapi Inflasi." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 3 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i3.204>.
- Warjiyo, Perry, and Solikin. *Kebijakan Moneter Indonesia. Jurnal Manajemen Maranatha*. Vol. 3, 2003.